



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 20 September 2018

Halaman: 9

► **POLEMIC APARTEMEN**

Warga Dipersilakan Menggugat ke PTUN

JOGJA—Perseteruan antara warga Terban dan Pengembang Apartemen Dhika Universe terus berlanjut. Oleh pengembang, warga yang menolak proyek pembangunan apartemen setinggi 32 meter itu untuk dipersilakan membawa persoalan itu ke ranah hukum.

Project Director PT Adhi Persada Properti (APP) selaku pengembang Apartemen Dhika Universe Damaryanda Pawitan tetap kukuh bahwa proses perizinan yang dilakukan tidak menyalahi aturan. Dia yakin tidak ada pelanggaran prosedur yang dilakukan. "Penolakan itu wajar, pasti ada pro dan kontra. Kenapa IMB keluar? Itu artinya prosedur sudah yang dilalui dengan benar. Pemberi izin sendiri adalah pemerintah. Kalau dokumen amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) keluar dan IMB juga dikeluarkan, kenapa kami yang diserang?" kata dia, Rabu (19/9).

Seharusnya, warga yang menolak pembangunan apartemen menempuh upaya hukum dengan membawa persoalan ini ke PTUN dengan menggugat pihak pemberi izin. *Developer*, menurut dia sudah mendapat izin untuk membangun apartemen tersebut. "Pemberi izin itu pemerintah dan kami tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Kalau warga khawatir air tanah turun, kami sudah ada kerja sama dengan PDAM dengan jaringan khusus, tidak menggunakan air dalam," kata dia.

Damar juga mengklaim telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) soal garis sependam sungai. Menurut dia lokasi apartemen tersebut masih jauh dari bantaran Kali Code. "[Polemik] itu hanya digoreng terus. Kami akan terus melanjutkan proses pembangunan ini karena kami sudah mengantongi izin," ucap dia.

Seperti diketahui, warga RT 1 RW 1 Kelurahan Terban, Gondokusuman terus menolak pembangunan apartemen di wilayah mereka. Mereka bahkan mengadakan persoalan itu kepada Forpi Jogja yang segera menyidak lokasi.

● Lebih Lengkap Halaman 10

Warga Dipersilakan...

Tulus Wardaya, salah satu warga setempat membantah pernyataan PT APP yang telah menjalankan proses perizinan sesuai prosedur. Menurut dia sosialisasi yang dilakukan pihak pengembang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan melibatkan tim kecil.

"Itu tim siluman. Bergerak dengan menggunakan iming-iming uang untuk mendulang persetujuan warga dan perangkat. Tim bentukan PT APP ini menjalankan, mengedarkan dan menggunakan keusioner yang dinilai tidak objektif," kata Tulus.

Buktinya, kata dia, saat sidang amdal yang pertama dokumen dari PT APP dinyatakan tidak lolos. Dia tidak mengetahui kenapa saat sidang kedua, dokumen itu mendadak bisa lolos padahal pemrakarsa dan data-data yang digunakan masih sama. "Apakah langkah-langkah seperti itu yang disebut mengikuti prosedur?" ucap dia.

Membantah Intimidasi

Lurah Terban Anif Luhur Kurniawan membantah hasil temuan Forpi Jogja soal adanya intimidasi yang dialami warga penolak apartemen. Dia mengklaim pemerintah setempat, mulai dari kecamatan, kelurahan hingga pengurus RT dan RW sudah berupaya untuk *ngemong* seluruh warga tanpa terkecuali.

Dia mengaku saat proses sosialisasi APP langsung turun ke warga. Kelurahan tidak ikut mencampuri masalah tersebut. Meski begitu kelurahan berharap sosialisasi benar-benar bisa diterima oleh seluruh warga. "Ini masing-masing kelompok tensinya masih tinggi. Saya berharap agar ketua kelompok bisa menurunkan ketegangan lebih dulu. Kami selalu berusaha seperti itu," kata Anif. (Abdul Hamid Rizak)

Instansi	Nilai Berita		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Terban	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Dinas Lingkungan Hidup			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005